![https://www.facebook.com/tr?id=630127010403946&ev=PageView&noscript=1](data:None;base64...)![https://d5nxst8fruw4z.cloudfront.net/atrk.gif?account=yIXbf1a0Ix00UK](data:None;base64...)​





#### [LOG OUT](https://majalah.tempo.co/logout)

[STATUS](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159951/berantakannya-koordinasi-pemerintah-pusat-dan-daerah-menanggulangi-corona)

**[Berlangganan](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159951/berantakannya-koordinasi-pemerintah-pusat-dan-daerah-menanggulangi-corona)**

 [BERAKHIR](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159951/berantakannya-koordinasi-pemerintah-pusat-dan-daerah-menanggulangi-corona)

**[28 April 2020](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159951/berantakannya-koordinasi-pemerintah-pusat-dan-daerah-menanggulangi-corona)**

 [Laporan Utama](https://majalah.tempo.co/laporan-utama)

 [Opini](https://majalah.tempo.co/opini)

 [Nasional](https://majalah.tempo.co/nasional)

 [Hukum](https://majalah.tempo.co/hukum)

 [Sains](https://majalah.tempo.co/sains)

 [Ekonomi](https://majalah.tempo.co/ekonomi)

 [Internasional](https://majalah.tempo.co/internasional)

 [Olahraga](https://majalah.tempo.co/olahraga)

 [Gaya Hidup](https://majalah.tempo.co/gaya-hidup)

 [Seni](https://majalah.tempo.co/seni)

 [Tokoh](https://majalah.tempo.co/tokoh)

 [Prelude](https://majalah.tempo.co/prelude)

 [Laporan Khusus](https://majalah.tempo.co/laporan-khusus)

 [Catatan Pinggir](https://majalah.tempo.co/catatan-pinggir)

 [Financial Times](https://majalah.tempo.co/financial-times)



Laporan Utama 2/7

[Sebelumnya](https://majalah.tempo.co/read/159957/menyangkal-krisis-menuai-bencana) [Selanjutnya](https://majalah.tempo.co/read/159955/ketar-ketir-daerah-menghadapi-wabah)

# Menyangkal Krisis Menuai Bencana

**Sikap pemerintah dalam menangani virus corona terus menuai kritik. Sejumlah rumah sakit di daerah dan lembaga penelitian juga mempertanyakan sikap Kementerian Kesehatan yang memonopoli pengujian virus. Kekisruhan pun terjadi dalam pengadaan alat pendeteksi corona. Menghindari kericuhan di masyarakat, Presiden Jokowi menolak penyebaran corona disebut sebagai krisis.**



## [I Wayan Agus Purnomo](https://majalah.tempo.co/profile/915/i-wayan-agus-purnomo)

Edisi : 14 Maret 2020

[i](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159957/salah-langkah-jokowi-hadapi-wabah-corona) 

Simulasi penanganan pasien terjangkit virus corona di Ruang Isolasi RSUP Sanglah, Denpasar, Bali, 12 Februari 2020. TEMPO/Johannes P. Christo

##### Badan Kesehatan Dunia mempertanyakan lagi keterbukaan pemerintah mengatasi virus corona.

##### Jokowi menunjuk Kepala BNPB Doni Monardo sebagai ketua gugus tugas penanganan corona.

##### Pemerintah Indonesia sempat mengabaikan tawaran Singapura soal alat pengujian corona.

DITEKEN Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia Tedros Adhanom Ghebreyesus, surat bertanggal 10 Maret 2020 itu ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Dalam surat itu, Tedros secara tersirat mempertanyakan keterbukaan pemerintah dalam menangani kasus Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Badan Kesehatan Dunia pun merasa perlu menerima data tersebut. “Data ini penting sebagai alat mengukur risiko yang komprehensif secara global,” ujar Tedros.

Dalam surat yang sama, Tedros menyoroti pendekatan Indonesia dalam melacak dan mendeteksi kasus corona. Ia meminta Indonesia menaikkan status kasus Covid-19 menjadi darurat nasional. Tedros pun menyarankan pemerintah mendesentralisasi laboratorium untuk memantau kluster penyebaran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, membenarkan adanya surat tersebut.

Ini bukan pertama kali Badan Kesehatan Dunia menyampaikan keraguan terhadap pemerintah. Sebelum Presiden mengumumkan kasus pertama pada Senin, 2 Maret lalu, pejabat perwakilan Badan Kesehatan Dunia dalam pertemuan dengan Kementerian Kesehatan mempertanyakan kemampuan dan keterbukaan Indonesia dalam menangani corona. Mantan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Anung Sugihantono, yang hadir dalam pertemuan itu, membenarkan adanya keraguan tersebut.

Sikap pemerintah dalam menangani kasus corona tak henti menuai kritik dari dalam dan luar negeri. Kritik ini kian gencar setelah Presiden Jokowi mengakui pemerintah tidak membuka semua data mengenai penyebaran virus corona kepada publik. “Kami tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan masyarakat,” ujarnya setelah meninjau kesiapan Bandar Udara Soekarno-Hatta mengantisipasi corona pada Jumat, 13 Maret lalu.



*Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan kesiapan Bandara dalam menghadapi COVID-19 di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, 13 Maret 2020. ANTARA/Muhammad Iqbal*

Sejak membuka empat kasus awal positif corona, pemerintah tak membuka lagi data seputar pasien. Pemerintah juga tak mengumumkan lokasi penularan pasien dan rumah sakit yang merawatnya. Menurut Jokowi, kebijakan yang diambil tiap negara berbeda-beda. Presiden pun mengklaim pemerintah bergerak cepat setelah muncul kasus baru ataupun kluster baru.

Sejumlah lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, seperti Komisi Nasional untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Lokataru, serta Migrant Care, membandingkan Indonesia dengan Korea Selatan, yang sama-sama menghadapi ancaman Covid-19. Di Korea Selatan, pemerintah menyiarkan secara berkala bukan hanya kasus baru, melainkan juga lokasi ditemukannya kasus. Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pemerintah cukup mengumumkan lokasi kasus corona agar masyarakat bisa menghindari penularan.

Sikap pemerintah yang tak ingin menimbulkan kegaduhan sudah diputuskan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Kepresidenan beberapa hari sebelum kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan agenda rapat itu membahas penanganan virus corona yang melanda dunia. “Presiden berpesan bahwa jangan menggunakan istilah ‘krisis’ dalam menghadapi corona supaya tidak menimbulkan kepanikan,” tutur Muhadjir.

•••

PADA hari yang sama dengan tibanya surat dari Badan Kesehatan Dunia, Jokowi kembali mengumpulkan sejumlah pembantunya di Istana Bogor. Dalam rapat terbatas itu, Jokowi menugasi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo melakukan koordinasi penanganan corona. Belakangan, Jokowi juga menunjuk Doni sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Dari Istana Bogor, Doni bergerak ke kantornya. Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini mengumpulkan instansi pemerintahan lain, seperti Kantor Staf Presiden, kepolisian, dan tentara, untuk berkoordinasi. Dimintai konfirmasi mengenai sejumlah pertemuan ini, Doni mengatakan masih mengurus persiapan penanganan corona. Pada Sabtu, 14 Maret lalu, Doni menyebut wabah corona sebagai bencana non-alam. “Sudah ditetapkan sebagai pandemi global, maka statusnya adalah bencana non-alam.”

Juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan Presiden Jokowi sudah berkomunikasi dengan Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia setelah menerima surat. Menurut dia, pembentukan gugus tugas merupakan jawaban atas rekomendasi Badan Kesehatan Dunia. Langkah pemerintah lainnya, kata dia, menajamkan koordinasi serta membuat protokol komunikasi antara pusat dan daerah.



*Mobil ambulans yang dipersiapan di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, 5 Maret 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan*

Persoalan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah ini juga disampaikan Ikatan Dokter Indonesia. Ketua Satuan Tugas IDI untuk Corona, Zubairi Djoerban, mengaku menerima keluhan dari sejumlah rumah sakit tentang kelambanan penyampaian hasil pengujian oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan. Selama ini, pengujian memang hanya dilakukan badan tersebut. Menurut Zubairi, hasil itu harus dilaporkan lebih dulu kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Achmad Yurianto atau Menteri Kesehatan.

Ribetnya alur informasi itu, kata Zubairi, merepotkan rumah sakit, apalagi jika hasilnya positif.. Sebab, rumah sakit mesti menelusuri kembali dengan siapa saja pasien tersebut berkontak. Kritik mengenai monopoli Kementerian Kesehatan juga disampaikan peneliti Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Herawati Sudoyo. Di Singapura, dia mencontohkan, penelusuran kasus positif corona melibatkan kementerian kesehatan, institusi riset, dan kepolisian.

Dikritik banyak pihak, Kementerian Kesehatan mulai melunak. Presiden Jokowi pun memerintahkan kementerian ini menggandeng lembaga lain untuk menguji suspek Covid-19, seperti laboratorium Universitas Airlangga dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Pada Senin, 9 Maret lalu, sejumlah pejabat Kementerian Kesehatan bertemu dengan pimpinan Eijkman. Salah satu agendanya adalah soal pembuatan vaksin corona.

Pemimpin Eijkman, Amin Subandrio, belum bersedia mendetailkan keterlibatan lembaganya secara teknis. “Belum sampai rincian,” ujar Amin. Sedangkan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Achmad Yurianto mengatakan Eijkman belum mampu membuat vaksin corona dengan alasan spesimen yang dimiliki belum banyak.

Menurut Yurianto, lembaga lain dilibatkan karena penyebaran Covid-19 sudah tak terkendali. Untuk mencegah penularan meluas, diperlukan pendeteksian secara cepat. Sentralisasi pengujian bakal membuat Kementerian Kesehatan kesulitan mendeteksi kasus-kasus yang timbul. “Kami buat mengalir, supaya jalan, sehingga tak terlalu lama pendeteksiannya,” ujar Yurianto.

Hingga Sabtu, 14 Maret lalu, sudah ada 96 kasus positif corona di Indonesia. Salah satu kasus positif adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurut Yurianto, sebanyak lima pasien meninggal dan delapan sembuh. Jumlah kasus positif itu meningkat dibanding sehari sebelumnya, yaitu 69 kasus dan empat orang meninggal.

•••

RIBETNYA penanganan corona juga terjadi dalam pengadaan alat pengujian. Pada 13 Februari lalu, Chief Executive Temasek Foundation International Benedict Cheong menulis surat kepada Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Ngurah Swajaya. Isi surat itu menginformasikan alat pendeteksi Covid-19 bernama VereCoV Detection Kit. Dalam satu kali pengujian, alat tersebut diklaim bisa mendeteksi dan mengidentifikasi Covid-19 serta membedakannya dengan virus Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Hasilnya pun terlihat dalam dua setengah jam.

Melalui surat yang sama, Benedict Cheong menyatakan ada 500 unit alat tersebut yang tersedia pada pertengahan Februari lalu. Ia menyatakan Temasek siap bekerja sama dengan instansi yang ditunjuk untuk mengukur hasil pengujian alat yang dikembangkan Veredus Laboratories, perusahaan bioteknologi yang berbasis di Singapura, itu.

Kepada Tempo, Ngurah Swajaya membenarkan isi surat tersebut. “Mereka menawarkan melalui kedutaan,” ujar Swajaya pada Jumat, 13 Maret lalu. Temasek Foundation belum bisa dimintai tanggapan soal surat ini. Mereka tidak membalas surat elektronik yang Tempo kirim pada Kamis, 12 Maret lalu.



Sebulan setelah surat itu keluar, pemerintah tak kunjung merespons tawaran tersebut. Baru pada pekan lalu, Jokowi berkomunikasi dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Ngurah Swajaya membenarkan adanya komunikasi tersebut. Dalam pembicaraan dua kepala negara, kerja sama dengan Singapura diputuskan melalui business to business. Kementerian Badan Usaha Milik Negara kemudian diminta membereskan soal impor alat tes tersebut. “Karena ini urusan privat,” kata Swajaya.

Anggota staf khusus Menteri BUMN, Muhammad Ikhsan, membenarkan adanya tawaran alat tes dari Temasek. Menurut Ikhsan, informasi bantuan ini pada awalnya disampaikan Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Indonesia di Singapura. Kementerian BUMN kemudian menunjuk holding farmasi BUMN yang bakal mengimpor alat tersebut. “Ini kerja sama atas nama solidaritas,” kata Ikhsan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tak bersedia menjawab soal urusan alat tes ini.

Sejumlah pejabat di Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri bercerita, kedatangan alat tes itu sempat ditolak Kementerian Kesehatan. Maka yang ditugasi membawa peralatan tersebut ke Indonesia adalah Kementerian BUMN. Muhammad Ikhsan tak menampik info bahwa masih ada lembaga yang menolak alat itu. Namun dia meminta persoalan ini tak dibesar-besarkan. “Tinggal dijalankan pelan-pelan. Ada yang reluctant atau enggak, kan biasa,” ujar Ikhsan.



*Petugas saat melakukan penyemprotan cairan desinfektan pada lingkungan Sea World, Ancol, Jakarta,14 Maret 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W*

Namun dua pejabat di Kementerian Kesehatan mengatakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menolak peralatan tersebut karena merasa alat yang tersedia selama ini sudah sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia. Para pejabat di kementerian itu pun mencurigai ada motif bisnis dalam pengadaan alat tersebut. Seorang di antaranya bercerita, ketika virus corona mulai mewabah ke berbagai negara, muncul berbagai tawaran untuk membeli alat pendeteksi.

Juru bicara penanganan corona Indonesia, Achmad Yurianto, membantah info bahwa alat pengujian itu merupakan bantuan dari Singapura. Versi Kementerian Kesehatan, mereka memang membeli alat tes melalui Temasek Foundation International, sebagai salah satu agen. Menurut Yurianto, Singapura tak mungkin menyumbangkan alat tes mengingat juga sedang kerepotan dengan isu corona. “Indonesia membayar alat tersebut,” katanya.

Pada Rabu, 11 Maret lalu, dua petinggi PT Kimia Farma, bagian dari holding farmasi BUMN, terbang ke Singapura. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia pada pagi hari, keduanya kembali pada hari yang sama dengan membawa enam boks alat penguji corona. Juru bicara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Deni Surjantoro, membenarkan adanya barang masuk dari Singapura yang terkait dengan corona. “Namun saya tidak bisa menjelaskan isinya,” ujar Deni.

Honesti Basyir, Direktur Utama PT Bio Farma, perusahaan yang menjadi induk holding farmasi, membenarkan kabar bahwa dua anak buahnya berangkat ke Singapura. Hanya, dia mengatakan perusahaannya belum membeli alat tes dalam jumlah besar karena perlu pengujian lebih dulu. “Kami juga masih membuka kemungkinan mencari alat tes lain dari Korea atau Cina,” tutur Honesti.

# ****WAYAN AGUS PURNOMO, DEVY ERNIS, HUSSEIN ABRI YUSUF, NUR ALFIYAH, EGI ADYATAMA****

# Akrobat tanpa Kabar Pusat

**Koordinasi pemerintah pusat dan daerah mengatasi penyebaran corona berantakan. Muncul perlawanan dari daerah.**



## [Devy Ernis](https://majalah.tempo.co/profile/1211/devy-ernis)

Edisi : 14 Maret 2020

[i](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159951/berantakannya-koordinasi-pemerintah-pusat-dan-daerah-menanggulangi-corona) 

Perawat membawa pasien dalam pengawasan Covid-19 menuju kamar isolasi khusus RSUD dr Iskak, Tulungagung, Jawa Timur, 13 Maret 2020. ANTARA/Destyan Sujarwoko

##### Kementerian Kesehatan irit membagikan data penderita corona.

##### Pemerintah daerah berinisiatif mengambil langkah penanggulangan penyebaran wabah.

##### Pemerintah pusat mengkritik langkah sejumlah kepala daerah.

DIUNDANG ke dalam grup WhatsApp yang berisi kepala dinas kesehatan dari berbagai penjuru Tanah Air, Herlin Ferliana jadi lebih sering mengecek telepon selulernya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur itu kerap mengamati pesan dari penghuni grup lainnya tentang penanganan wabah Coronavirus Disease atau Covid-19. “Di grup itu, kami berkoordinasi,” ujar Herlin pada Jumat, 13 Maret lalu.

Menurut Herlin, grup WhatsApp tersebut baru dibentuk Kementerian Kesehatan pada hari itu—atau sebelas hari setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama virus corona pada Senin, 2 Maret lalu. Sejak kasus pertama diumumkan, angka penderita corona terus meningkat. Pada Kamis, 12 Maret lalu, Kementerian Kesehatan mencatat 34 kasus. Pada Sabtu, 14 Maret, jumlahnya meroket menjadi 96 orang—lima di antaranya meninggal.

Munculnya grup tersebut dipicu oleh tersendatnya komunikasi antara Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan di daerah. Herlin, misalnya, mengeluh Kementerian Kesehatan kurang terbuka kepada dinas kesehatan. Dia mencontohkan, daerah belum bisa mengakses data pasien yang terpapar corona. Padahal data itu diperlukan untuk melacak orang-orang yang berkontak fisik dengan pasien tersebut. Keterbatasan data itu pun dikeluhkan sejumlah provinsi.

Macetnya komunikasi pun terjadi ketika dinas kesehatan daerah ingin mengetahui status positif atau tidaknya pasien. Seorang pasien yang dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, Surakarta, baru diketahui terinfeksi corona setelah juru bicara pemerintah untuk corona sekaligus Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto, mengumumkannya pada Jumat, 13 Maret lalu. Dua hari sebelumnya, pasien itu telah meninggal.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, sebelum pasien tersebut meninggal, status laki-laki 59 tahun itu adalah orang dalam pengawasan. Menurut Ganjar, spesimen telah dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan pada Selasa, 10 Maret lalu. Setelah status positif diumumkan, pemerintah Jawa Tengah pun tak mengetahui kluster pasien itu termasuk baru atau lama. Padahal data itu diperlukan untuk melacak potensi penyebaran virus.

Mengetahui ada pasien positif corona meninggal di wilayahnya, Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo langsung menyatakan peristiwa itu sebagai kejadian luar biasa. Hadi meniadakan kegiatan pemerintah seperti upacara dan apel di Balai Kota. Murid sekolah pun diminta belajar di rumah selama dua pekan. Hadi juga menutup sejumlah tempat wisata dan hiburan. “Saya pilih dimarahi orang waras daripada dimarahi orang sakit,” katanya dalam bahasa Jawa.

Di Bali, status kesehatan pasien positif corona asal Inggris juga terlambat diketahui. Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati pada Kamis, 12 Maret lalu, menilai Kementerian Kesehatan tertutup mengenai informasi tersebut. Dinas Kesehatan Bali baru mengetahui status pasien kasus 25 tersebut setelah dia meninggal di Rumah Sakit Sanglah, Bali, pada Rabu, 11 Maret lalu.

Informasi mengenai riwayat perjalanan pasien ke-25 itu juga berbeda-beda. Menurut Sekretaris Daerah Bali Dewa Made Indra, pasien kasus ke-25 berwisata ke Bali pada 29 Februari lalu. Tiga hari kemudian, dia datang ke rumah sakit swasta karena demam. Setelah lima hari, pasien itu dilarikan ke Sanglah, yang menjadi rumah sakit rujukan corona.

Namun juru bicara pemerintah untuk corona, Achmad Yurianto, mengatakan pasien itu baru tiba di Pulau Dewata pada Ahad, 8 Maret lalu, dan sempat transit di Qatar. Begitu masuk ke Indonesia, pasien itu dilarikan ke rumah sakit. Yurianto mengatakan tak ada kewajiban pusat menginformasikannya kepada daerah. “Saya tak memberikan laporan ke provinsi karena yang melakukan pelacakan adalah kabupaten/kota,” ujar Yurianto.



*Suasana RSUD Dr. Moewardi, Solo, setelah pengumuman meninggalnya pasien yang terinfeksi corona di Jawa Tengah, 13 Maret 2020. ANTARA/Mohammad Ayudha*

Seretnya pasokan data dari pusat membuat kepala daerah berakrobat untuk menanggulangi penyebaran corona. Menurut Hadi Rudyatmo, kepala daerah belum pernah diajak berbicara oleh pemerintah pusat mengenai penanganan Covid-19. “Tidak ada instruksi dari pusat. Kami harus berkreasi sendiri,” katanya.

Bukan hanya soal data pasien, kekisruhan pengumuman kasus positif corona pun terjadi. Gubernur Banten Wahidin Halim pada Kamis, 12 Maret lalu, mengumumkan melalui Instagram bahwa dua warga Banten positif terjangkit corona. “Artinya, sudah ada empat warga Banten yang terkena virus corona,” kata Wahidin dalam video berdurasi hampir dua menit. Yurianto mengatakan kewenangan mengumumkan pasien corona ada pada pemerintah pusat. “Prosedurnya begitu. Kami tak pernah menyampaikan data ke gubernur. Kalau beliau mendapat data sendiri, ya, terserah,” katanya.

Di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bergerak cepat dengan membuat situs khusus yang memuat informasi tentang corona. Pada Jumat malam, 13 Maret lalu, situs corona.jakarta.go.id menampilkan jumlah pasien dalam pemantauan 586 orang, dalam pengawasan 261 orang, dan positif 69 orang.

Anies juga rajin menggelar konferensi pers untuk menyampaikan data terbaru. Berbeda dengan pemerintah pusat yang tak membuka data sebaran kasus, Anies justru mengumumkan sebaran titik pasien corona di Jakarta. Pada Sabtu, 14 Maret lalu, Anies juga mengumumkan penutupan sekolah dan pemberlakuan proses belajar-mengajar jarak jauh selama dua pekan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menunda ujian nasional.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sempat mempertanyakan langkah Anies membuat situs sendiri karena pemerintah pusat sudah memiliki situs khusus. Sekretaris Jenderal Partai NasDem ini mengatakan pemerintah telah memutuskan bahwa narasi dan informasi tentang corona harus selaras. Johnny mengatakan daerah semestinya mengikuti instruksi dari pusat. Namun pada Jumat, 13 Maret lalu, Presiden Joko Widodo ikut memuji Anies—juga Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil—sebagai kepala daerah yang mampu memberikan sosialisasi dan edukasi tentang wabah corona.

##### ****DEVY ERNIS, EGY ADYATAMA, DEWI NURITA, NURHADI (JAWA TIMUR), JAMAL A NASHR, AHMAD RAFIQ (SOLO), JONIANSYAH HARDJONO, AYU CIPTA (TANGERANG), MADE ARGAWA (BALI)****

id.langganan@gmail.com 2020-03-16 08:59:01

[Covid-19](https://majalah.tempo.co/tag/covid-19) [Achmad Yurianto](https://majalah.tempo.co/tag/achmad-yurianto) [Virus Corona](https://majalah.tempo.co/tag/virus-corona) [Anies Baswedan](https://majalah.tempo.co/tag/anies-baswedan)

id.langganan@gmail.com

Laporan Utama 2/7

[Sebelumnya](https://majalah.tempo.co/read/159957/menyangkal-krisis-menuai-bencana) [Selanjutnya](https://majalah.tempo.co/read/159955/ketar-ketir-daerah-menghadapi-wabah)

# Ketar-ketir Daerah Menghadapi Wabah

**Sejumlah daerah minim persiapan menghadapi wabah Covid-19. Menunggu kiriman alat dari Kementerian Kesehatan.**



## [Nur Alfiyah BT Tarkhadi](https://majalah.tempo.co/profile/1014/nur-alfiyah-bt-tarkhadi)

Edisi : 14 Maret 2020

[i](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159955/persiapan-minim-pemerintah-daerah-menghadapi-virus-corona) 

Pengukuran suhu tubuh pelintas batas yang masuk dari Malaysia di Pos Lintas Batas Negara Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Februari 2020. ANTARA/Agus Alfian

##### Sejumlah daerah kekurangan alat untuk menghadapi wabah Covid-19.

##### DKI Jakarta dan Surakarta meliburkan sekolah dan membatalkan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

##### Balai di daerah yang ditunjuk untuk mengetes Covid-19 masih menunggu kiriman primer dari Kementerian Kesehatan.

SAMBIL menyimak siaran berita televisi tentang perkembangan penyebaran Covid-19, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat Harrison menelepon seorang anggota stafnya. Ia menanyakan kiriman alat pelindung diri untuk para petugas kesehatan yang menangani pasien diduga terjangkit Covid-19, penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru. “Belum datang juga hari ini?” Harrison bertanya kepada lawan bicaranya, Jumat, 13 Maret lalu.

Harrison lalu menuliskan beberapa angka di selembar kertas. Ia rupanya sedang menghitung jumlah alat pelindung diri yang tersedia di provinsi itu. Tanpa alat pelindung diri menyerupai pakaian astronaut tersebut, para petugas kesehatan rawan tertular Covid-19 dari pasien yang mereka tangani. Harrison kemudian menghela napas berat. “RSUD Soedarso (Pontianak) sudah mulai menggunakan jas hujan,” ujarnya. Ia menambahkan, di Ketapang dan Sintang, alat pelindung diri hanya cukup untuk tiga hari ke depan.

Rumah Sakit Umum Daerah Soedarso adalah satu-satunya rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 di Pontianak. Ada tiga rumah sakit lain yang menjadi rujukan untuk Provinsi Kalimantan Barat, yakni RSUD Abdul Aziz, Singkawang; RSUD Ade M. Djoen, Sintang; dan RSUD Agoesdjam, Ketapang. Tiga rumah sakit pertama sudah memiliki dua-empat ruang isolasi. Adapun RSUD Agoesdjam, yang baru ditetapkan sebagai rumah sakit rujukan oleh pemerintah, sedang mempersiapkan ruangan. Mereka telah menangani 13 pasien. Satu orang dinyatakan positif pada Sabtu, 14 Maret lalu. Sepuluh pasien dinyatakan negatif Covid-19, sedangkan dua lainnya masih menunggu hasil laboratorium dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan di Jakarta.

Pemerintah pusat menambah jumlah rumah sakit rujukan lantaran banyak warga negara Cina yang bekerja di Kalimantan Barat. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat pada 2017 mencatat ada 468 warga negara Cina yang bekerja di perusahaan pertambangan PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Ketapang. Masyarakat setempat khawatir para pendatang itu membawa virus. Isu tersebut sempat viral di media sosial.

Pemerintah provinsi juga ketar-ketir karena wilayah mereka berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Sudah ada tiga orang positif menderita Covid-19 di Sarawak. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji memerintahkan orang yang datang dari Sarawak mengisolasi diri selama 30 hari.

Selain kekurangan alat pelindung diri, kata Harrison, mereka sedang krisis bahan khusus untuk mengirimkan spesimen (virus transport media). Spesimen dari pasien harus dikirimkan ke Balitbangkes. Mereka sebelumnya membeli bahan tersebut secara mandiri sebanyak 50 buah. Tapi sampai Jumat, 13 Maret lalu, tinggal tersisa lima buah. Dinas Kesehatan juga khawatir karena Kalimantan Barat hanya memiliki satu ventilator, yang ditempatkan di RSUD Soedarso. Dinas Kesehatan belum berani menggunakan dana tak terduga milik provinsi untuk membeli peralatan karena prosedur penggunaan duitnya harus didahului penetapan kejadian luar biasa (KLB). “Ketetapan KLB baru akan keluar setelah ada kasus,” tutur Harrison.

Berbeda dengan Kalimantan Barat yang belum berani mengeluarkan dana tak terduga, dua provinsi yang sudah terjangkit Covid-19, yakni Jawa Barat dan DKI Jakarta, telah bersiap menggelontorkan dana. Jawa Barat akan merogoh kocek dari dana tak terduga Rp 15 miliar. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, duit itu akan dipakai untuk belanja kebutuhan peralatan kesehatan, seperti perlengkapan ruang isolasi, ventilator, dan alat pelindung diri bagi petugas kesehatan untuk rumah sakit yang tak ditunjuk menjadi rujukan oleh Kementerian Kesehatan. Termasuk untuk rumah sakit di Kota Tasikmalaya, yang foto petugasnya pekan lalu viral di media sosial karena menggunakan jas hujan saat mengantarkan pasien yang diduga terjangkit Covid-19.

Gubernur yang akrab disapa Emil itu memutuskan menyiagakan 27 rumah sakit lantaran Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, sekitar 49 juta jiwa. Jika virus sampai menyebar, ia khawatir delapan rumah sakit yang ditunjuk Kementerian tak mampu menampung pasien. Jumlah dana yang disiapkan tersebut jauh di bawah kebutuhan, yang perkiraan awalnya sekitar Rp 50 miliar. Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Achmad Ru'yat, salah satu sumber anggaran untuk menambal kebutuhan adalah pengalihan dana yang semula untuk penyertaan modal Bank BJB.

Adapun DKI Jakarta menyiapkan dana Rp 54 miliar untuk menghadapi wabah ini, termasuk membeli alat pelindung diri. Pemerintah DKI juga memperketat izin kegiatan yang melibatkan banyak orang sampai April nanti. “Ada 30 kegiatan yang sedang dikaji,” ujar Ketua Tim Review Perizinan Pemerintah Provinsi DKI Benny Agus Chandra, Kamis, 12 Maret lalu.

Pemerintah DKI Jakarta sudah membatalkan tiga konser yang sedianya diselenggarakan pada Maret ini, yakni festival musik Head in the Clouds yang diselenggarakan manajemen artis asal Amerika Serikat, 88rising; pertunjukan grup musik asal Jepang, Babymetal; dan konser band asal Inggris, Foals. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga memutuskan menutup semua tempat wisata milik pemerintah DKI—di antaranya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, dan Monumen Nasional—selama dua pekan sejak Sabtu, 14 Maret lalu.



*Petugas unit gawat darurat Melasari, menunjukkan ruang isolasi untuk pasien virus corona di RSUD Dr Slamet, Garut, Jawa Barat, 3 Maret 2020. ANTARA/Adeng Bustomi*

Menurut juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, keputusan memperketat izin keramaian diserahkan kepada daerah. Namun untuk urusan alat kesehatan, seperti alat pelindung diri, akan dibantu Kementerian Kesehatan. Kementerian sudah mengepul stok alat pelindung diri di instalasi farmasi provinsi. Kalau rumah sakit kekurangan, kata Yuri, mereka tinggal minta ke instalasi yang ada di daerahnya. Namun Kementerian tak membagikan alat pelindung diri secara merata untuk semua daerah. “Beban antardaerah tak sama. Kalimantan Barat itu pasiennya hanya satu,” ujarnya.

Kementerian Kesehatan juga sejak dua pekan lalu menunjuk sepuluh laboratorium di daerah untuk memeriksa spesimen pasien yang diduga terjangkit Covid-19. Menurut Yuri, ada empat Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit serta enam Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang disiagakan. Empat balai besar tersebut berada di DKI Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarbaru (Kalimantan Selatan). Sedangkan enam balai lain berada di Batam, Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Ambon.

Kepala Balai Besar Jakarta Naning Nugrahini mengatakan sampai saat ini Balitbangkes belum mengirimkan primer, yakni bahan dasar untuk menentukan positif atau negatif Covid-19. Tanpa primer tersebut, mereka tak bisa menguji. “Ada beberapa rumah sakit dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten yang mengirimkan spesimennya kepada kami, tapi kami tak bisa mengetes,” katanya. Balai Besar Jakarta akhirnya mengirimkan spesimen tersebut ke Balitbangkes.

Naning mendengar kabar bahwa Balitbangkes sedang membeli primer tersebut dan baru akan tersedia dua-tiga minggu lagi. Ia tak yakin semua balai akan mendapatkan jatah primer itu. “Tapi mungkin karena orderannya tak banyak, tak semua akan dapat,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Yogyakarta Irene mengatakan, sampai Jumat, 13 Maret lalu, tes hanya dilakukan di Balitbangkes. Petugas di balainya hanya berperan mengirimkan spesimen yang diambil dari rumah sakit ke Jakarta.

Menurut Yuri, Balitbangkes sampai sekarang belum bisa membagikan primer lantaran masih melatih para petugas balai daerah di Jakarta. Jika pelatihannya selesai, mereka akan membawa pulang primer tersebut. “Balitbangkes juga perlu memverifikasi ulang alat yang ada di balai masih berfungsi dengan baik atau tidak,” katanya.

**NUR ALFIYAH, LANI DIANA, ASHEANTY PAHLEVI (PONTIANAK), AHMAD FIKRI (BANDUNG), AHMAD RAFIQ (SOLO), PARLIZA HENDRAWAN (PALEMBANG), MEI LEANDHA (MEDAN), JAMAL A. NASHR (SEMARANG), NURHADI (SURABAYA), YOGI EKA SAHPUTRA (BATAM)**

# Kota-kota yang Mendadak Sunyi

**Tak ada lagi keramaian di Italia sejak negeri itu ditutup. Banyaknya penduduk berusia tua menjadi salah satu faktor tingkat kematian tinggi dalam wabah virus corona.**



## [Tempo](https://majalah.tempo.co/profile/2/tempo)

Edisi : 14 Maret 2020

[i](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159954/suasana-kota-kota-di-dunia-yang-lockdown-akibat-corona) 

Suasana hari ketiga kota Roma, setelah pemerintah Italia melakukan lockdown untuk mencegah penyebaran virus corona, 12 Maret 2020. Reuters/Remo Casilli

##### Kota-kota Italia mendadak sepi setelah pemerintah memutuskan menutup negeri itu.

##### Banyaknya penduduk berusia tua menjadi salah satu faktor tingkat kematian tinggi dalam wabah virus corona.

##### Denmark memutuskan menutup pintu perbatasannya.

KOTA-KOTA Italia mendadak seperti kota mati. Petrus Dori, pastor asal Flores, Nusa Tenggara Timur, berkunjung ke Kantor Kepolisian Roma, yang tidak jauh dari Vatikan, untuk mengurus perpanjangan masa izin tinggal, Selasa, 10 Maret lalu. “Saya mendapati kantor itu tutup karena alasan virus corona,” kata Petrus, Jumat, 13 Maret lalu.

Mahasiswa doktoral di fakultas pendidikan Università Pontificia Salesiana, Roma, itu hanya membaca pengumuman di pintu kantor yang meminta para tamu menghubungi mereka hanya melalui surat elektronik. Ia pun meninggalkan kantor itu dan melangkah ke lapangan di depan Basilika Santo Petrus. Tujuan favorit para wisatawan yang berkunjung ke Roma itu biasanya selalu ramai, tapi hari itu sepi pengunjung. “Yang kujumpai hanya para polisi dan penjaga keamanan di sekitar Vatikan,” ucap Petrus.

Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengumumkan penutupan (lockdown) seluruh negeri pada Senin, 9 Maret lalu, ketika jumlah kasus terkait dengan Covid-19 mencapai 7.400. Hingga Sabtu, 14 Maret lalu, jumlah kasus mencapai 17.660 dan yang meninggal 1.266 orang, yang membuat Italia menjadi negara kedua dengan kasus corona terbanyak setelah Cina.

Pemerintah mengimbau penduduk tetap tinggal di rumah untuk mencegah penyebaran virus corona. Conte menyatakan kebijakan ini diambil untuk melindungi orang-orang yang paling rentan. “Marilah kita saling menjauhi agar boleh saling merangkul kembali,” ujarnya dalam pidato yang disiarkan televisi.



*Suasana Saint Peter Square di Vatican, 11 Maret 2020. Reuters/Gugliemo Mangiapane*

Perjalanan diizinkan dengan pembatasan ketat. Semua toko, restoran, kafe, dan museum ditutup. Hanya gerai makanan dan toko obat yang tetap buka. Bank, kantor pos, kantor-kantor pemerintah, dan tempat umum, seperti bioskop, juga ditutup hingga 2 April nanti. Berbagai kegiatan, termasuk pertandingan olahraga dan acara berkumpul, ditangguhkan. Sekolah dan universitas juga diperintahkan tutup.

Vatikan memerintahkan gereja-gereja Roma ditutup. Dekrit yang dikeluarkan Kardinal Angelo De Donatis, wakil Paus Fransiskus di Keuskupan Roma, ini berlaku hingga 3 April nanti dan berdampak pada lebih dari 900 paroki dan gereja bersejarah di Roma. Sebelumnya, Paus Fransiskus menghentikan audiensi umum dan perayaan misa harian di Kapel Santa Marta. Sekarang misa di sana hanya disiarkan lewat televisi setiap pagi.

Milan, salah satu kota favorit wisatawan, juga mendadak sunyi. Apartemen Veja Prata Ginting, warga negara Indonesia yang bermukim di kota itu, terletak di Viale Vincenzo Lancetti, sekitar 2 kilometer dari stasiun kereta Centrale dan biasa dilewati banyak orang yang berangkat atau pulang kerja. “Kini jalanan di sekitar apartemen saya sepi sekali. Hanya ada satu-dua orang yang lewat. Trem kosong dan bus diisi satu-dua orang,” tuturnya, Kamis, 12 Maret lalu.

Veja menuturkan, terakhir kali dia ke luar apartemen pada Senin, 9 Maret lalu, untuk belanja kebutuhan pribadi. “Supermarket tidak seramai sebelumnya. Saya melihat sedikit orang, semua dengan masker dan selalu menjaga jarak,” kata mahasiswa program master teknik mekanis Politecnico di Milano itu.

Menurut Veja, perubahan kebijakan pemerintah Italia tentang penutupan kawasan karena wabah corona terkesan mendadak dan membuat bingung dia dan rekan-rekannya. Kini semua kegiatan berkumpul dilarang. Selain itu, kalau hendak ke luar, penduduk harus membawa surat jalan karena akan diperiksa polisi secara acak. “Ada denda 206 euro atau ditahan tiga bulan kalau tidak membawa surat, bahkan dipenjara 1-12 tahun kalau ternyata positif terkena corona,” ucapnya.

### ****Hingga 14 Maret lalu, jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 145.695. Sebanyak 5.436 pasien meninggal dan 72.550 sembuh. Data menunjukkan orang tua, terutama yang berusia 70 tahun ke atas, paling berisiko bila terjangkit virus corona.****

Kota Cosenza di Provinsi Calabria, Italia selatan, juga sepi. Noven Hendranto, warga Indonesia yang tinggal di kota itu, mengatakan kini nyaris tak terlihat lagi aktivitas di tempat umum. Berbagai tempat hiburan, seperti diskotek dan kafe, tutup total. Restoran yang semula masih diperbolehkan buka hingga pukul 6 sore juga berhenti beroperasi. “Yang diperbolehkan buka sampai malam hanya supermarket dan apotek,” ujar mahasiswa jurusan ilmu koperasi dan pembangunan Università della Calabria itu.

Italia salah satu negara maju yang terkena dampak terburuk Covid-19 yang kini dinyatakan sebagai pandemi oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO). Marina Della Giusta, profesor ekonomi di University of Reading, Inggris, menyatakan angka kematian yang tinggi dalam wabah Covid-19 di Italia ini terkait dengan fakta bahwa negara itu memiliki populasi orang tua terbanyak di Eropa dengan 60 persen dari sekitar 60 juta penduduknya berusia 40 tahun ke atas.

Kebanyakan pasien Covid-19 yang meninggal adalah kaum sepuh yang sudah memiliki masalah kesehatan. “Demografi Italia berdampak lebih besar dibanding banyak negara lain,” katanya kepada ITV.

Giusta juga menyebutkan faktor lain, yakni gaya hidup orang Italia yang senang berada di luar rumah dan menyentuh satu sama lain. “Ruang fisik antarpribadi di Italia jauh lebih dekat daripada di Inggris.”

Banyak ahli menilai pemerintah Italia juga terlambat mengambil kebijakan untuk mencegah wabah. Della Giusta, yang berasal dari Giusta di Italia, menyatakan banyak orang tidak mengisolasi diri dengan sangat serius saat sekolah pertama kali ditutup di daerah utara beberapa pekan lalu. “Ketika sekolah ditutup di Lombardy, banyak orang hanya menjemput anak-anak mereka dan pergi berlibur ke rumah peristirahatan mereka di pegunungan dan di tepi laut di daerah lain,” tuturnya. “Mereka pikir membuat anak-anaknya aman dengan membawa mereka pergi, tapi perilaku semacam ini benar-benar sangat merusak.”

Denmark menjadi negara kedua di Eropa yang menutup perbatasannya. Penutupan diberlakukan mulai Sabtu, 14 Maret lalu, hingga 13 April nanti. Semua penerbangan dari dan ke negeri itu dihentikan. Pengunjung akan diusir bila tak dapat memberikan alasan yang sah untuk masuk, seperti bukti bahwa dia warga negara Denmark atau orang asing yang bekerja di sana.

“Kita berada di wilayah yang belum dipetakan. Kita berada di tengah sesuatu yang belum pernah kita hadapi,” ujar Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen dalam konferensi pers, Jumat, 13 Maret lalu. “Saat ini saya tahu bahwa seluruh daftar pengetatan sangat ekstrem dan akan dipandang sangat ekstrem, tapi saya yakin hal itu pantas,” ucapnya seperti dikutip media Denmark, The Local.

Kebijakan itu keluar setelah Otoritas Kesehatan Denmark melaporkan 16 kasus baru Covid-19, yang membuat jumlah total kasus menjadi 801. Hingga 14 Maret lalu, negeri itu memiliki 804 kasus corona dengan dua pasien dalam kondisi kritis dan satu sudah pulih.



*Suasana pertokoan di Kopenhagen setelah Pemerintah Denmark mengungumkan penyebaran virus corona, di Denmark, Reuters/Nikolaj Skydsgaard*

Sementara itu, Irlandia dan Prancis adalah negara terakhir yang menutup sekolah dan universitas untuk mencegah laju penularan virus. Jumlah kasus corona di Irlandia melonjak dari 43 menjadi 70 pada 13 Maret lalu, saat negeri itu menyatakan satu pasien Covid-19 meninggal.

Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mengumumkan sekolah dan fasilitas penitipan anak ditutup hingga 29 Maret mendatang. Kegiatan yang mengumpulkan massa lebih dari 500 orang ditangguhkan dan masyarakat diminta sebisa mungkin bekerja dari rumah. “Ini akan membuat perubahan dalam cara kita hidup dan saya tahu bahwa saya telah meminta rakyat melakukan pengorbanan besar,” tuturnya melalui siaran televisi.

Hingga 14 Maret lalu, jumlah kasus Covid-19 di seluruh dunia mencapai 145.695. Sebanyak 5.436 pasien meninggal dan 72.550 sembuh. Data menunjukkan orang tua, terutama yang berusia 70 tahun ke atas, paling berisiko bila terjangkit virus corona.

Petrus Dori menyadari benar hal itu. “Rasa cemas akan tertular itu menghantui saya karena saya hidup di tengah komunitas yang besar dan menghirup udara yang sama, yang sedang terkontaminasi virus,” kata pastor 52 tahun tersebut. “Saya banyak berdoa untuk Italia dan dunia, untuk orang sakit dan untuk paramedis yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang sakit. Inilah sumbangan kecil pribadi saya dalam menanggulangi wabah yang sudah mendunia ini.”

##### IWAN KURNIAWAN

# Ketika Ka'bah tanpa Umrah

**Pemerintah Arab Saudi menutup Mekah dan Madinah untuk kegiatan umrah. Berdampak pada ekonomi.**



## [Tempo](https://majalah.tempo.co/profile/2/tempo)

Edisi : 14 Maret 2020

[i](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159944/kabah-di-mekah-tak-lagi-dijamah-umrah) 

Suasana Ka’bah di Mekah, 6 Maret 2020. Reuters/Gannoe Essa

##### Pemerintah Arab Saudi menutup Mekah dan Madinah untuk kegiatan umrah.

##### Saudi mengumumkan 17 kasus baru Covid-19 sehingga total menjadi 62 kasus.

##### Biro perjalanan penyelenggara umrah bisa rugi besar.

ZULKARNAEN Nasution, pemandu haji dan umrah dari Indonesia, sedang berkendara di Jalan Ibrahim al-Khalil, Mekah, Arab Saudi, ketika melihat sekumpulan orang duduk-duduk di pelataran Hilton Makkah Convention Hotel, Jumat sore, 6 Maret lalu. Sekitar 200 orang berpakaian ihram itu ternyata jemaah Indonesia yang bermaksud mengunjungi Ka’bah di Masjid al-Haram untuk menunaikan ibadah umrah. “Sudah dua hari mereka menunggu, tapi tak bisa masuk untuk tawaf,” kata Zulkarnaen kepada Tempo pada Senin, 9 Maret lalu.

Menurut pria asal Medan, Sumatera Utara, yang sudah tiga setengah tahun menjadi pemandu di Saudi tersebut, jemaah asal Indonesia terlihat kecewa. “Mereka berharap bisa melihat Ka’bah.” Untuk memenuhi rukun umrah, jemaah harus sai atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwa di Masjid al-Haram dan tawaf atau berjalan mengelilingi Ka’bah, yang terletak di tengahnya. Namun pemerintah Saudi menutup kompleks bangunan suci itu sebagai langkah penanganan coronavirus disease 2019 atau Covid-19.

Zulkarnaen melihat Ka’bah sedang dibersihkan dan disemprot disinfektan pada 5 Maret lalu, saat kawasan itu mulai ditutup. Dua lapis pagar besi ditegakkan mengelilingi bangunan yang dibangun Nabi Ibrahim sekitar 2.000 tahun sebelum Masehi itu. Pagar-pagar setinggi 1 meter juga ditegakkan di antara tiang-tiang Masjid al-Haram yang menghadap ke Ka’bah sehingga orang tak dapat melihat Ka’bah dari gedung tersebut.

Hingga Jumat, 13 Maret lalu, Kementerian Kesehatan Saudi mengumumkan 17 kasus baru, 11 di antaranya dialami warga negara Mesir yang kini dikarantina di Mekah. Total kasus positif virus corona di Saudi mencapai 62. Kementerian juga menyatakan satu pasien telah sembuh.

Untuk mencegah penyebaran virus, Menteri Urusan Islam Abdullatif al-Sheikh menerapkan sejumlah kebijakan. Menurut Saudi Gazette, kebijakan itu antara lain pembatasan salat Jumat maksimal 15 menit dan larangan iktikaf di masjid. Sejak 8 Maret lalu, pemerintah melarang semua pendatang dengan visa umrah masuk ke Mekah dan Madinah. Kebijakan ini praktis membuat kegiatan umrah tak mungkin dilakukan. Namun warga Saudi masih boleh mengunjungi dua kota suci itu. “Mekah masih terbuka bagi pengunjung dari seluruh wilayah kerajaan. Yang ditangguhkan hanya kegiatan umrah,” ucap Wakil Menteri Haji Abdulfattah Mashat kepada Al Arabiya.

Survei Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi pada 2018 menunjukkan anggota jemaah umrah sepanjang 1439 Hijriah (2017-2018) berjumlah lebih dari 6,7 juta orang. Ini empat kali lipat jumlah anggota jemaah haji, yang sekitar 1,7 juta orang. Kegiatan umrah dan haji menyumbang sekitar US$ 12 miliar atau 7 persen dari produk domestik bruto negeri itu setiap tahun. Pemerintah Saudi di bawah Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman berencana meningkatkan pendapatan dari ibadah kaum muslim ini menjadi US$ 150 miliar pada 2022. Rencana ini merupakan bagian dari Visi Saudi 2030 dan upaya negeri itu untuk meningkatkan pendapatan dari sektor di luar ekspor minyak.

Sekitar 43 persen jemaah umrah datang pada bulan Rajab, Syaban, dan Ramadan. Tiga bulan paling populer untuk berumrah itu jatuh antara Februari dan Mei tahun ini. Dengan kata lain, penutupan Mekah justru terjadi pada masa-masa puncak umrah, yang bakal mempengaruhi pendapatan Saudi tahun ini.

Perusahaan penyelenggara perjalanan umrah di Indonesia juga terkena imbas. Menurut Kementerian Agama, anggota jemaah umrah Indonesia sekitar 1 juta per tahun. Bila ongkos umrah rata-rata Rp 20 juta per orang, biro-biro perjalanan umrah bisa rugi hingga Rp 20 triliun bila tahun ini tak bisa mengirim jemaah. Melihat perkembangan ini, Zulkarnaen Nasution pun memutuskan pulang ke Indonesia. “Saya pulang. Ngapain menunggu sesuatu yang belum pasti,” tuturnya.

##### ****IWAN KURNIAWAN****

id.langganan@gmail.com 2020-03-16 09:07:53

[Kabah](https://majalah.tempo.co/tag/kabah) [Covid-19](https://majalah.tempo.co/tag/covid-19) [Virus Corona](https://majalah.tempo.co/tag/virus-corona) [Umroh](https://majalah.tempo.co/tag/umroh)

id.langganan@gmail.com

Laporan Utama 5/7

[Sebelumnya](https://majalah.tempo.co/read/159954/kota-kota-yang-mendadak-sunyi) [Selanjutnya](https://majalah.tempo.co/read/159949/achmad-yurianto-ini-seperti-efek-domino)

# Achmad Yurianto: Ini Seperti Efek Domino

**Pemerintah Presiden Joko Widodo menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional, menyusul keputusan Badan Kesehatan Dunia menjadikan Covid-19 sebagai pandemi. Juru bicara penanganan wabah virus corona, Achmad Yurianto, menjelaskan mengapa komando penanganan wabah kini berada di tangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.**



## [Tempo](https://majalah.tempo.co/profile/2/tempo)

Edisi : 14 Maret 2020

[i](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159949/penjelasan-jubir-penanganan-wabah-corona-soal-strategi-jokowi) 

Achmad Yurianto. TEMPO/Muhammad Hidayat

##### Presiden Joko Widodo menetapkan wabah virus corona sebagai bencana nasional non-alam.

##### Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo ditunjuk sebagai ketua tim reaksi cepat penanganan wabah corona.

##### Pengujian spesimen virus corona tak lagi terpusat di laboratorium Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

PRESIDEN Joko Widodo mengevaluasi sejumlah kebijakan penanganan wabah virus corona. Setelah Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan status pandemi Covid-19 pada Rabu, 11 Maret lalu, pemerintah menetapkan wabah corona sebagai bencana nasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo ditunjuk memimpin tim reaksi cepat untuk mengatasi dampak penyebaran virus tersebut.

Jokowi juga membuka akses pengujian spesimen di luar Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk mempercepat deteksi dini virus yang hingga Sabtu, 14 Maret lalu, itu telah positif menginfeksi 96 orang, yang lima di antaranya meninggal. “Kita butuh cepat karena, setelah ditelusuri, ternyata pasiennya nyebar ke mana-mana,” kata juru bicara penanganan wabah virus corona, Achmad Yurianto, kepada Tempo lewat sambungan telepon, Jumat, 13 Maret lalu.

**Sejauh mana penetapan status pandemi mempengaruhi protokol penanganan wabah corona?**

Status pandemi itu dalam konteks pembatasan antarnegara, bukan antara pemerintah pusat dan daerah. Misalnya, beberapa negara memutuskan menutup diri atau membatasi penyebaran virus dengan mencabut fasilitas bebas visa. Strategi pusat-daerah sejak awal tidak berubah. Hanya, kami minta diperkuat lagi karena penyebaran penyakit ini menjadi makin sulit dideteksi dengan cara biasa.

**Bagaimana peran Kementerian Kesehatan setelah penanganan wabah corona berada di tangan BNPB?**

Wabah corona sudah dinyatakan sebagai bencana. Dalam konteks ini, tanggung jawab BNPB berkaitan dengan manajemen besarnya. Tapi incident commander tetap pada Menteri Kesehatan karena ini menyangkut kesehatan. Tapi kami kan tidak mungkin mengatasinya sendiri, karena kita tahu bahwa sekarang dampaknya pun bukan hanya kesehatan.

**Apa pengaruh penetapan wabah corona sebagai bencana nasional?**

Implikasinya ke mana-mana, termasuk soal pembiayaan. Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana tegas, kok, bahwa pembiayaan harus menggunakan dana siap pakai yang disiapkan negara dan itu nonbujeter. Dana itu jelas ketentuannya digunakan untuk layanan perawatan, logistik, hingga operasionalisasi penanggulangan.

**Bagaimana dengan pembiayaan untuk penanganan wabah corona di daerah?**

Beberapa daerah punya biaya tidak terduga dalam anggarannya. Kita tentu mengetahui kemampuan fiskal setiap daerah itu disparitasnya berbeda. Karena itulah gap ini kemudian diisi alokasi anggaran pusat.

**Apakah tes awal untuk deteksi virus corona ditanggung pemerintah?**

Lha, biaya tes itu kan ditanggung negara.

**Mengapa pemerintah akhirnya tidak memusatkan pengujian sampel di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan?**

Setelah dilakukan tracing, ternyata pasiennya nyebar ke mana-mana, enggak keruan. Kita harus berpacu untuk mencari, menemukan, dan mengisolasi sumber kontak karena itu signifikan untuk mencegah penyebaran virus. Ini kayak efek domino, satu menular menjadi berapa. Kalau tidak dikejar betul, nanti kita kelewatan. Penambahan kasusnya cepet banget. Cara menghentikannya cuma satu, temukan yang positif, isolasi, supaya enggak nular lagi.

**Bagaimana kesiapan lembaga lain untuk pengujian spesimen virus corona?**

Memeriksa virus itu enggak sama kayak memeriksa golongan darah atau tes kehamilan. Ada variabel dasar yang harus dipenuhi dan ini standar dunia, yaitu ruangan dengan standar keamanan minimal biosafety level 2 (BSL-2). Dan itu enggak semuanya punya.

**Laboratorium BSL-2 terdapat di mana saja?**

Universitas Airlangga dan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman itu BSL-2. Balitbangkes itu BSL-3 karena bisa juga memanipulasi virus. Pada skala yang lebih kecil, fasilitas uji seukuran lemari atau kabinet dimiliki Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan di Jakarta, Banjar Baru, Surabaya, Yogyakarta, dan balai yang lebih kecil di Batam. Sekarang kami menyiapkan lagi di Medan, Palembang, Ambon, Manado, dan Makassar.

id.langganan@gmail.com 2020-03-16 09:08:12

[Achmad Yurianto](https://majalah.tempo.co/tag/achmad-yurianto) [Virus Corona](https://majalah.tempo.co/tag/virus-corona) [Jokowi](https://majalah.tempo.co/tag/jokowi) [Kementerian Kesehatan](https://majalah.tempo.co/tag/kementerian-kesehatan) [BNPB](https://majalah.tempo.co/tag/bnpb)

id.langganan@gmail.com

Laporan Utama 6/7

[Sebelumnya](https://majalah.tempo.co/read/159944/ketika-kabah-tanpa-umrah) [Selanjutnya](https://majalah.tempo.co/read/159900/satwa-liar-penampung-virus)

# Satwa Liar Penampung Virus

**Peneliti menemukan virus Covid-19, yang telah menginfeksi lebih dari 111 ribu orang di 108 negara, berasal dari kelelawar pemakan serangga. Setidaknya ada 108 spesies kelelawar yang menjadi inang penyakit zoonosis atau penyakit binatang yang dapat menular ke manusia. Perlu pemantauan satwa liar.**



## [Dody Hidayat](https://majalah.tempo.co/profile/304/dody-hidayat)

Edisi : 14 Maret 2020

[i](https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/159900/kelelawar-menjadi-inang-virus-corona-yang-mewabah) 

Satwa Liar Penampung Virus

##### Kelelawar jenis Rhinolophus affinis terbukti mengandung virus yang berkerabat dekat dengan virus Covid-19.

##### Kelelawar menjadi satwa liar yang paling banyak menampung penyakit zoonosis. Dari 1.100 spesies kelelawar yang diketahui di dunia, 108 spesies merupakan inang dari 28 macam penyakit zoonosis.

##### Perlu penelitian pemantauan satwa liar, termasuk kelelawar, karena potensinya menularkan penyakit ke manusia.

TIGA puluh lima hari setelah empat pedagang dari Pasar Grosir Makanan Laut Huanan, Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, positif terpapar coronavirus disease 2019 (Covid-19) pada 29 Desember tahun lalu, para peneliti menyimpulkan biang kerok penyakit yang gejalanya seperti pneumonia itu adalah kelelawar. Dalam laporan yang terbit di Nature edisi 3 Februari 2020, Peng Zhou dari Wuhan Institute of Virology dan tim menemukan urutan genom virus yang dinamai SARS-CoV-2 yang diambil dari para pasien identik 96,2 persen dengan virus BatCoV RaTG13 yang terdapat pada kelelawar asal Yunnan, Rhinolophus affinis.

Kelelawar tak sekali ini saja menjadi sumber penyakit bagi manusia. Wabah sindrom pernapasan Timur Tengah (MERS) pada 2012, yang menginfeksi hampir 2.500 dan menewaskan 858 penderita, juga berasal dari kelelawar jenis berbeda. Begitu pula sindrom pernapasan akut parah (SARS) 17 tahun lalu, yang menginfeksi 8.000 orang dan menelan korban 774 jiwa. Penelitian Zhou juga mengkonfirmasi kemiripan genom virus SARS-CoV-2 itu dengan virus SARS sebesar 94,4 persen. Perbedaannya, pada SARS, inang perantara antara kelelawar dan manusia adalah musang bulan (Paguma larvata), sedangkan pada Covid-19 masih misterius.

Joko Pamungkas dari Fakultas Kedokteran Hewan Institut Pertanian Bogor mengatakan kelelawar juga reservoir virus Nipah, yang pertama kali muncul di Hendra, Australia, pada 1994 dan muncul kembali di Nipah, Malaysia, pada 1998. “Dari empat genus virus corona, yang paling berbahaya bagi manusia adalah betacoronavirus. Ada indikasi kuat betacoronavirus yang ada pada kelelawar menjadi moyang virus yang kemudian menginfeksi manusia,” kata Joko, yang menjabat Kepala Pusat Penelitian Satwa Primata IPB 2012-2017.

Menurut Joko, penelitian pengamatan atau surveillance terhadap satwa liar penampung virus-virus yang berpotensi menginfeksi manusia seperti kelelawar ini sangat penting. Penelitian seperti itu dilakukan Joko pada 2011 dan berakhir tahun lalu melalui program Emerging Pandemic Threat (EPT), yang didanai USAID. “Salah satu komponen EPT adalah Proyek PREDICT yang melibatkan lebih dari 30 negara di Asia-Afrika. Proyek ini bertujuan memetakan semua virus pada satwa liar dan melihat adakah potensi bahaya bagi manusia di masa depan,” ujar Joko.

Satwa liar yang dipantau melalui penelitian PREDICT ada tiga takson, yakni kelelawar, rodent atau hewan pengerat, dan primata. Pemilihan itu, menurut Joko, berdasarkan literatur yang ditelusuri hingga 1940, hewan-hewan tersebut merupakan pembawa penyakit terbanyak bagi manusia. Menurut penelitian yang terbit dalam Trends in Parasitology 2016, kelelawar adalah inang dari 28 penyakit zoonosis, hewan pengerat menampung 85 penyakit, karnivora membawa 83 penyakit, hewan berkuku atau ulugata mengandung 68 penyakit, dan primata membawa 63 penyakit.

Dalam penelitian PREDICT fase 1, yang berlangsung mulai 2011 hingga 2014, dapat dikumpulkan lebih dari 400 sampel satwa liar dari Jawa Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Bali. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel yang berjumlah hampir 2.500 itu menemukan 33 virus dari lima famili, yakni Astroviridae, Herpesviridae, Paramyxoviridae, Rhabdoviridae, dan Coronaviridae sebanyak sembilan virus. “Setelah kami urutkan dan lihat pohon filogenetiknya, ternyata jaraknya cukup jauh dari SARS, MERS, atau Nipah,” ucap Joko, yang menjadi Koordinator Indonesia untuk PREDICT.

Adapun data PREDICT fase 2, kata Joko, belum dapat dipublikasikan karena masih menunggu persetujuan pemerintah. Tapi Joko mengaku ada 30 virus yang bisa ditemukan, 13 di antaranya merupakan virus baru yang belum pernah dilaporkan. “Sama dengan fase 1, virus-virus itu masih jauh kekerabatannya dengan SARS atau MERS,” ujarnya. “Namun saya tidak berani mengatakan bahwa kita aman karena jumlah sampel kami sangat kecil dan frekuensi pemantauan pun tidak sering.”

PREDICT Indonesia juga bekerja berdasarkan prioritas karena dana yang terbatas. “Kami memilih kelelawar pemakan buah, terutama genus Pteropus dan Acerodon, yang paling banyak dijual di pasar,” tutur Joko. Padahal, kata Ibnu Maryanto, ahli kelelawar dan tikus dari Pusat Penelitian Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, ada 329 spesies kelelawar di Indonesia, termasuk Rhinolophus affinis, yang menjadi inang moyang dari SARS-CoV-2.

Menurut Ibnu, yang menjadi ketua penyusun buku Checklist of Mammal of indonesia Third Edition, Rhinolophus affinis yang pemakan serangga itu memiliki nama lokal prok-bruk hutan dari bahasa Dayak. Sebaran geografinya di Asia dari Bangladesh, Bhutan, Nepal, Kamboja, Cina, Hong Kong, India, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, sampai Indonesia. “Di Indonesia sebarannya ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur,” ujar Ibnu.

Joko tidak mau berspekulasi apakah prok-bruk hutan membawa virus yang menjadi moyang virus SARS-CoV-2 seperti saudaranya di Cina. Menurut dia, segala kemungkinan bisa terjadi, apalagi jangkauan jelajah kelelawar bisa mencapai ribuan kilometer. “Contohnya, virus Hendra di Australia kemudian muncul di Malaysia dan dikenal sebagai virus Nipah, setelah itu menyebar ke India, Bangladesh, Nepal dan sekitarnya. Mungkin saja terjadi pertemuan, lalu terjadi perpindahan intra-spesies dan antar-spesies,” kata Joko. Pemantauan satwa liar merupakan investasi sehingga Joko berharap pemerintah mengalokasikan anggaran yang per tahun sebesar Rp 1-3 miliar itu.

##### ****DODY HIDAYAT (****NATURE, SCIENCENEWS, SCIENCEDAILY, NCBI****)****

# Morat-marit Menghadapi Pandemi

**Pemerintah gelagapan menangani penyebaran virus corona. Kementerian Kesehatan mengabaikan bantuan negara tetangga.**



## [Tempo](https://majalah.tempo.co/profile/2/tempo)

Edisi : 14 Maret 2020

[i](https://majalah.tempo.co/read/opini/159953/editorial-morat-marit-pemerintah-menghadapi-pandemi-corona) 

Morat-marit Menghadapi Pandemi

PEMERINTAH Joko Widodo bisa dituduh melanggar konstitusi jika tak bergegas memperbaiki strateginya menghadapi penyebaran Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Lambat dan tidak padunya respons pemerintah menangkal wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemi global ini tak menunjukkan usaha sungguh-sungguh untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, seperti diperintahkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pekan lalu, Presiden Jokowi memang akhirnya membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo. Sayangnya, kebijakan ini tidak dibarengi pemaparan strategi yang komprehensif dan transparan untuk membangun kepercayaan dan optimisme warga.

Kepada pers, Presiden Jokowi justru mengakui bahwa pemerintah tidak menyampaikan semua data kepada masyarakat agar tidak ada kepanikan. Ini jelas kebijakan yang sungguh keliru. Sensor informasi justru membuat masyarakat bertanya-tanya tentang skala wabah ini di negeri kita.

Kita harus belajar dari Singapura dan Taiwan. Kedua negara itu membuktikan bahwa transparansi menjadi kunci keberhasilan menangani penyebaran wabah. Dengan tetap menutup identitas pasien, pemerintah Taiwan mengumumkan waktu, lokasi, rute pergerakan, plus domisili seseorang yang positif terkena corona. Dengan begitu, penduduk lain yang mungkin ikut terpapar bisa melaporkan diri untuk kemudian dites.

Karena itu, tugas pertama Gugus Tugas adalah meningkatkan transparansi penanganan wabah Covid-19 di Indonesia. Keterbukaan data akan meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi krisis. Kita tentu tidak berharap wabah ini terus meluas. Namun, dengan informasi yang benar, publik bisa bersiap dan tidak panik ketika wabah betul-betul membesar.

Prioritas kedua Gugus Tugas adalah memperbanyak tes atau pengujian orang yang diperkirakan terkena corona. Makin banyak tes dilakukan, makin tergambar tingkat kegawatan wabah ini. Menyembunyikan kenyataan sebenarnya justru akan menyulitkan dokter dan penyedia pelayanan kesehatan dalam mengantisipasi ledakan jumlah pasien corona. Kebijakan pemerintah menambah lembaga yang boleh melakukan pengujian corona, meski terlambat, perlu diapresiasi.

Setelah tes diperbanyak, proses identifikasi kluster-kluster yang positif perlu terus diintensifkan agar semua orang yang berpotensi tertular atau menjadi carrier bisa ditemukan dan diisolasi. Kerja sama semua pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengerjakan tugas berat ini. Tak boleh lagi ada pemerintah daerah yang tidak diajak berbicara soal keberadaan pasien positif corona di wilayahnya.

Selain itu, bantuan dari negara lain tidak semestinya ditolak. Sungguh disayangkan, Kementerian Kesehatan sempat mengabaikan tawaran bantuan berupa alat penguji (test kit) dari Singapura. Keputusan ini berbahaya, terutama karena Indonesia tidak bergabung dalam inisiatif global penanggulangan wabah seperti The Coalition for Epidemic Preparedness Innovations dan Pandemic Emergency Financing Facility di Bank Dunia. Semua kontribusi dari pihak mana pun harus direspons dengan baik.

Hasil pengujian dengan jumlah cukup sangat penting untuk dasar mengambil langkah yang diperlukan. Kebijakan untuk mengisolasi satu kawasan yang tingkat penyebaran wabahnya sudah sangat tinggi, misalnya, hanya bisa diambil jika ada data yang memadai.

Inisiatif Pemerintah Kota Solo dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatasi keramaian, termasuk memindahkan kegiatan belajar di sekolah menjadi online, sudah tepat. Pemerintah pusat semestinya membuat panduan serupa untuk semua kepala daerah. Gubernur, bupati, dan wali kota harus tahu tingkat risiko wabah di daerahnya dan apa yang harus dilakukan untuk membatasi penyebaran virus corona ini.

Semua jajaran pemerintah harus sepaham bahwa dalam menghadapi pandemi ini prioritas tertinggi adalah melindungi penduduk. Pertimbangan lain, seperti “mempertahankan pertumbuhan ekonomi”, seharusnya diturunkan ke urutan bawah. Pejabat tak boleh justru beramai-ramai mengadakan kegiatan yang mengundang banyak orang dengan dalih menyelamatkan industri perhotelan, transportasi, dan pariwisata.

Dengan langkah-langkah pemerintah yang terkoordinasi baik, masyarakat bisa bersikap lebih tenang. Pada titik ini, solidaritas sosial masyarakat diharapkan juga terjaga. Semua warga secara sadar harus mengutamakan kepentingan bersama, tidak hanya mementingkan keselamatan masing-masing. Tanpa itu semua, Indonesia akan menjadi pusat ledakan baru kasus corona, justru ketika wabah di negara lain berangsur mereda.

id.langganan@gmail.com 2020-03-16 09:21:19

[Virus Corona](https://majalah.tempo.co/tag/virus-corona)

id.langganan@gmail.com

Opini 1/4

[Sebelumnya](https://majalah.tempo.co/read/159932/intimidasi-ahmadiyah-sampai-kapan) [Selanjutnya](https://majalah.tempo.co/read/159927/agar-tim-makin-semarak)

## Galeri Majalah

* 
* 
* 
* [TEMPO.CO](https://www.tempo.co/)
* [Majalah Tempo](https://majalah.tempo.co/)
* [Majalah Tempo English](https://magz.tempo.co/)
* [Koran Tempo](https://koran.tempo.co/)
* [Tempo Institute](https://tempo-institute.org/)
* [Indonesiana](https://www.indonesiana.id/)
* [Tempo Store](http://www.tempostore.id/)
* [Tempo.co English](https://en.tempo.co/)
* Copyright © 2017 PT Tempo Inti Media tbk